

BAB V

KESIMPULAN

Diestimasikan bahwa sedikitnya 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan dalam hidupnya. Terlebih lagi, setiap 2 jam, setidaknya 3 perempuan di Indonesia menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 35 perempuan di Indonesia merupakan korban dari tindak kekerasan seksual setiap harinya. Dalam Rekomendasi Umum No. 19 dari Konvensi Internasional CEDAW, kekerasan terhadap perempuan secara tegas dinyatakan sebagai bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan dengan dampak signifikan dalam menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan fundamentalnya berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, melalui Rekomendasi Umum No. 19, diingatkan kembali akan tanggung jawabnya untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah publik maupun privat. Dalam memenuhi komitmen tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan *de jure* untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Akan tetapi, sejak awal diberlakukan hingga dewasa ini, berbagai kebijakan dan payung hukum dari pemerintah tidak juga mampu untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal

tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang 2010 sampai dengan 2015.

Mengakarnya budaya patriarki dalam sistem sosial di Indonesia melumpuhkan penegakan dari berbagai payung hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah. Ketidaksetaraan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem sosial Indonesia yang patriarkis meresap kedalam kesadaran mayoritas masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali para penegak hukum. Sehingga perempuan korban kekerasan sulit untuk memperoleh proses peradilan memadai. Terlebih lagi, mengakarnya budaya patriarki dalam sistem sosial di Indonesia telah mendorong perempuan di Indonesia kedalam status inferior dengan memberatkan kekuasaan sepenuhnya pada laki-laki. Hal tersebut menciptakan keadaan dimana perempuan di Indonesia terkucilkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat secara umum, serta terbentuk untuk bergantung pada laki-laki.

Sebagai salah satu NGO dengan fokus mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan, Kalyanamitra kemudian berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menyadari presistensi dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam sistem sosial Indonesia yang patriarkis, Kalyanamitra kemudian melakukan pendekatan-pendekatan berbeda dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Upaya Kalyanamitra dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak memiliki kaitan langsung dengan implementasi konvensi internasional tersebut oleh

pemerintah. Akan tetapi, upaya-upaya Kalyanamitra apabila tidak dapat dikatakan berdampak, adalah sejalan dengan berbagai ketentuan dalam Konvensi Internasional CEDAW khususnya Rekomendasi Umum No. 19. Dengan demikian, Kalyanamitra juga turut berkontribusi untuk mencapai hasil *de facto* dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam penelitian ini, upaya dari Kalyanamitra digambarkan dengan menggunakan konsep NGO sebagai aktor pembangunan alternatif oleh Lewis dan Kanji yang terbagi kedalam tiga peran utamanyaitu sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep fungsi NGO oleh Karns dan Mingst serta konsep pemberdayaan perempuan oleh Naila Kabeer untuk mendukung penggambaran upaya dari Kalyanamitra.

Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan perempuan-perempuan tingkat akar rumput, Kalyanamitra menjalan perannya sebagai katalisator melalui pembentukan beberapa kelompok dampingan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran terkait kesetaraan gender dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya pemberdayaan perempuan dalam Program Pendampingan Komunitas. Dengan melaksanakan program tersebut, upaya dari Kalyanamitra selaras dengan anjuran dari Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 19 terkait Pasal 5 (a) dari konvensi internasional tersebut dalam memodifikasi “pola tingkah laku sosial dan budaya ...untuk menghapus prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktik lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin

atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan” dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui berbagai pendekatan, Kalyanamitra mencoba untuk menyadarkan para anggota kelompok dampungannya atas ketidaksetaraan dalam relasi gender yang berlangsung di Indonesia. Dimana menurut Naila Kabeer, dalam menciptakan suatu kesadaran baru, penting bagi perempuan untuk terlebih dahulu mengakui dan menyadari posisi subordinatnya. Dengan melaksanakan aktivitas usaha ekonomi dan pendidikan gender, Kalyanamitra memberikan pembelajaran dan wadah bagi para anggota kelompok dampungannya untuk dapat melatih partisipasi dan mengasah keterampilan untuk menimbulkan *power-within* atau kekuatan dari dalam diri para perempuan anggotanya sehingga dapat melihat dirinya sebagai individu aktif yang mampu untuk membuat keputusan. Terlebih lagi, penghasilan tambahan dari kegiatan usaha ekonomi selain dapat membangun kemandirian ekonomi, idealnya dapat memberikan pilihan bagi para anggotanya untuk terbebas dari tindak KDRT apabila terjadi. Dimana dalam konteks KDRT, menurut Rekomendasi Umum No. 19 dari Konvensi Internasional CEDAW, rendahnya kemandirian ekonomi kerap memaksa perempuan untuk bertahan dalam sebuah hubungan, meskipun telah mendapatkan tindak kekerasan dari pasangannya.

Dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya kekerasan seksual, Kalyanamitra juga menjalankan perannya sebagai pelaksana dengan memproduksi pengetahuan (*knowledge production*) menjadi sebuah barang publik. Sepanjang 2010 sampai dengan 2015, Kalyanamitra telah menghasilkan dua publikasi terkait kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk

buletin berjudul “Kekerasan Seksual: Dimana Tanggung Jawab Negara” serta sebuah materi audio-visual dalam bentuk film animasi berjudul “Kisah Mela dan Miko”. Buletin yang merupakan bagian dari Buletin Perempuan Bergerak sebagai program publikasi berkala dari organisasi tersebut memberikan berbagai informasi yang dapat diakses oleh publik terkait permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk didalamnya tulisan mengenai budaya patriarki sebagai faktor yang mendasari tindak kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, melalui buletin tersebut, upaya dari Kalyanamitra kembali selaras dengan Rekomendasi Umum No. 19 terkait pasal 5 (a) dari Konvensi Internasional CEDAW. Melalui edisi tersebut kemudian Kalyanamitra mengemas isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia sebagai pelanggaran dari hak konstitusional perempuan sebagai warga negara. Dapat dilihat bahwa melalui buletin tersebut, Kalyanamitra tidak hanya menjalankan perannya sebagai pelaksana menurut Lewis dan Kanji, melainkan juga menjalankan fungsinya dalam mengemas isu untuk menjadi konsumsi publik sesuai dengan konsep fungsi NGO oleh Karns dan Mingst.

Melalui film animasi “Kisah Mela dan Miko”, selain berupaya untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, khususnya dalam hubungan pacaran dengan memberikan informasi terkait cara menghadapi, mencegah, dan menangani tindak kekerasan seksual secara umum, dan kekerasan seksual dalam hubungan pacaran secara khusus, Kalyanamitra juga berupaya untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di dengan menggerakkan masyarakat untuk dapat ikut mendukung gerakan-gerakan perempuan lain di Indonesia dalam mendorong pemerintah untuk

mengesahkan RUU PKS. Hal tersebut dilakukan melalui diskusi publik dan pemutaran film animasi hasil dari keterlibatan Kalyanamitra dalam kemitraan pasif dengan Pemerintahan Kanada yang tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah kepada remaja sebagai target utama dari organisasi, melainkan juga kepada berbagai media yang kemudian meliput dan menyebarkan informasi dalam film animasi tersebut kepada masyarakat umum. Dimana menurut Lewis dan Kanji, peran NGO sebagai pelaksana sudah seharusnya dilihat dari fungsi potensialnya sebagai katalis untuk perubahan maupun perkembangan lainnya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia Kalyanamitra juga menjalankan peran sebagai katalisator dengan melakukan advokasi RUU KKG, juga sesuai dengan fungsi NGO dalam menurut Karns dan Mingst dalam menganjurkan perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Aktivitas advokasi RUU KKG dilakukan Kalyanamitra dalam jaringan kerja CWGI yang kemudian juga memanfaatkan jaringan kerjanya yang lain, yaitu JKP3 untuk mengoptimalkan penggunaan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, Kalyanamitra tidak hanya menjalankan perannya sebagai katalisator, melainkan juga menjalankan perannya sebagai mitra. Bekerja di dalam CWGI dan JKP3, Kalyanamitra mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui advokasi RUU KKG dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap komitmennya atas Kovensi Internasional CEDAW dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi serta mencapai kesetaraan substantif. Advokasi RUU KKG dilakukan oleh Kalyanamitra bersama dengan mitranya untuk mendorong terciptanya payung hukum

bagi mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga dapat mencegah berbagai bentuk permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan relasi gender, termasuk didalamnya kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, sekali lagi upaya dari Kalyanamitra dalam selaras dengan Rekomendasi Umum No. 19 dari Konvensi Internasional CEDAW mengenai kaitan dari pasal 5 (a) dari konvensi tersebut dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Kalyanamitra juga berupaya untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan menjalan perannya sebagai katalisator melalui aktivitas *watchdog*. Dilakukan melalui jaringan CWGI, dalam menjalankan peran sebagai *watchdog*, upaya Kalyanamitra berkaitan langsung dengan implementasi Konvensi Internasional CEDAW oleh pemerintah dengan menjadi *whistle-blower* kepada KOMite CEDAW melalui penyusunan Laporan Bayangan terkait tumpulnya berbagai payung hukum di Indonesia dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lewis, David dan Nazneen Kanji 2009. *Non-Governmental Organizations and Development* (New York: Routledge)

Blackburn, Susan 2004. *Women and The State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press)

Sjoberg, Laura dan J. Ann Tickner 2011. *Feminism and International Relations*, ed. (Oxon: Routledge)

Simons, Beth A. 2009. *Women and International Institutions: The Effects of Women Insitutions in Female Education. Power, Intedependence, and Nonstate Actors in Wolrd Politics*. (Inggris: Princeton University Press)

Karns, Margaret dan Karen Mingst 2010. *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, edisi ke-2 (Boulder: Lynne Reiner Publsheers)

Murniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender; Buku Pertama* (Magelang: Indoneisa Tera) hal. 5.

Creswell, John W 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke-3 (California: SAGE Publication)

Saxena, Kanchan. 2015 *Women's Potrait Through Gender Lenses Enabling Gender Equality: Future Generations of the Global World*, ed. Rodriguez, Eunice dan Wejnert, Barbara. *Research in Political Sociology volume 23*, <http://dx.doi.org/10.1108/S0895-993520150000023002>

Set, Sony. 2009. *Teen Dating Violence: Stop Kekerasan Dalam Pacaran* (Yogyakarta: Kanisius)

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, edisi ke-5 (Inggris: Oxford University Press)

Robinson, Kathryn dan Sharon Bessell. 2002. *Women in Indonesia: Gender, Equity, and Development* (Singapura: Institute of Southeast Asian Study)

Vatikiotis, Michal. 1998. *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and The Fall of The New Order* (New York: Routledge)

Jurnal

Treuhart, Mary P.. “No Woman No Cry: Ending The War on Women Worldwide and The International Violence Against Women Act.” *Boston University International Law Journal* 33, no. 75 (2015) <https://www.bu.edu/ilj/files/2015/01/Treuthart-Ending-the-War-on-Women-Worldwide.pdf> (diakses 13 April 2017).

Kolibonso, Rita, “Diskriminasi Itu Bernama Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Perempuan*, no. 4 (2006).

Rahman , Aminur. Women’s Empowerment: Concept and Beyond. *Global Journal of Human Social Science: Sociology and Culture* 13, no. 6 (2013): https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-Womens-Empowerment-Concept.pdf.8

Vanegas, Martha R dan Lisa R. Pruitt, “CEDAW and Rural Development: Empowering Women with Law from the Top down, Activism from the Bottom Up,” *University Baltimore Law Review* 41, no. 2 (2012): hal, 267, <https://scholarworks.law.ubalt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=1908&context=ublr>

- Sagala, Valentina R.. “Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan,” *Jurnal Perempuan* 20, no. 2 (2015)
- Lorber, Judith. “The Variety of Feminism and Their Contribution to Gender Equality,” *Oldenburger Universitätsreden*, no. 97 (1997) <http://oops.uni-oldenburg.de/1269/1/ur97.pdf> (diakses 3 juni, 2017)
- Becker, Mary. “Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive Feminism,” *University of Chicago Legal Forum*, no. 1 (1999) <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1999/iss1/3>
- Nimah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012)
- Munir, Lily. “Domestic Violence in Indonesia,” *Muslim World Journal of Human Rights* 2, no. 1 (2005): http://www.lfip.org/laws718/docs/lily-pdf/Domestic_violence.pdf
- Rahmawaty, Anita. “Perlindungan Hukum atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme UU No, 23 Tahun 2004 tentang PKDRT,” *Palastren* 7, no. 1 (2014): [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401032&val=6786&title=PE RLINDUNGAN%20HUKUM%20ATAS%20KEKERASAN%20TERHADAP%20PEREMPUAN%20:%20%20KRITISISME%20ATAS%20UU%20NO.%2023%20T AHUN%202004%20TENTANG%20KDRT](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=401032&val=6786&title=PE%20RLINDUNGAN%20HUKUM%20ATAS%20KEKERASAN%20TERHADAP%20PEREMPUAN%20:%20%20KRITISISME%20ATAS%20UU%20NO.%2023%20T%20AHUN%202004%20TENTANG%20KDRT)
- Sakina, Ade dan Dessy A. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia,” *Social Work Journal* 7, no. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/181589-ID-menyoroti-budaya-patriarki-di-indonesia.pdf>
- Tan, Lena. “Indonesian National Security During The Suharto New Order (1965-1998): The Role of Narratives of Peoplehood and The Construction of Gender,” *New Zealand Journal of Asian Study* 14, no. 1 (2012)

Ida, Rachma. "The Construction of Gender Identity in Indonesia: Between Cultural Norms, Economic Implications, and State Formation," *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 15, no. 1 (2001).

Hadiz, Liza. "Ideologi Gender Dibalik Definisi Legal-Fornal: Analisis Sosiologis Terhadap Definisi Perkosaan di Dalam Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 23, no. 1 (1993): <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/643/571>

DOKUMEN

Divisi Statistik PBB, *The Worlds Women 2015: Trends and Statistics*. Departemen Sosial dan Ekonomi.
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015_chapter6_t

Rekomendasi Umum No. 19 Konvensi Internasional CEDAW. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf

Rahayu, Indiah Ruth. *25 Tahun Kalyanamitra: Bertahan Ditengah Krisis*. Buletin Perempuan Bergerak Edisi I (2010).
http://www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2010_edisi1.pdf

UU No. 7 Tahun 1984. *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 29

UU No. 23 Tahun 2004. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara No. 95.

Lahulima, Achie S.. *CEDAW: Mengembalikan Hak-Hak Perempuan*, diterjemahkan (Jakarta: SMA Grafika Desa Putra, 2007), hal. 33.

Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. *Konsiderasi Gabungan Laporan Negara Indonesia ke-4 dan ke-5*. <https://documents-dds->

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/404/18/PDF/N0540418.pdf?OpenElement
(diakses 30 Mei, 2016)

Prosedur Pengaturan Komite CEDAW. melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/Part%20of%20HRI_GEN_3_Rev-3_7080_E.pdf

Wall, Liz. *Gender Equality and Violence Against Women*. Pusat Studi tentang Pelecehan Seksual Pemerintah Australia.

<https://aifs.gov.au/sites/default/files/publication-documents/ressum7.pdf> (diakses 17 Januari, 2018)

WHO. *Series of Briefing on Violence Prevention: Promoting Gender Equality to Prevent Violence Against Women*.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/gender.pdf (diakses 17 Januari, 2018)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181 Tahun 1998, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2015. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku* (Jakarta)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2011. *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara* (Jakarta)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara* (Jakarta)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2013. *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum* (Jakarta)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2014. *Kegentingan Kekerasan Seksual dan Lemahnya Upaya Penanganan Negara* (Jakarta)

UU No. 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Lembaran Negara No. 5234.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> (diakses 30 Mei, 2016)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf (diakses 30 Mei, 2016)

UU No. 1 Tahun 1974. *Perkawinan*, Lembaran Negara No. 1

Kalyanamitra. *Laporan Tahunan 2012: Terwujudnya Perempuan Indonesia yang Mandiri, Sadar Hak, dan Kritis*. http://www.kalyanamitra.or.id/files/annualreport/annualreport_2012.pdf

Kalyanamitra. 2010 *25 Tahun Kalyanamitra: Tetap Berpihak pada Kelompok Marginal*, dalam Buletin Perempuan Bergerak edisi ke-1

Kalyanamitra. 2005. *Laporan Dwi Tahunan 2002 dan 2003: Jejak Langkah Kalyanamitra* (Jakarta)

Kalyanamitra, *Membangun Kesadaran Gender Publik: Laporan Tahunan 2013*. <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Laporan-Tahunan-2013.pdf>

Kalyanamitra. *Laporan Tahunan 2015*. <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Laporan-Tahunan-2015.pdf> (diakses 1 Juni, 2017)

Kalyanamitra. *Perempuan Memberi Makna Pada Perubahan: Laporan Tahunan 2011*. <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Laporan-Tahunan-2011.pdf>

Kalyanamitra. *Terwujudnya Perempuan Indonesia yang Mandiri, Sadar Hak, dan Kritis: Laporan Tahunan 2012*. <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Laporan-Tahunan-2012.pdf>

Kalyanamitra. *Laporan Tahunan 2014*. <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2012/04/LAPORAN-TAHUN-2014.pdf>

Sulistyo, Joko. 2012. *Kekerasan Seksual: Dimana Tanggung Jawab Negara* “dalam *Buletin Perempuan Bergerak*” edisi 1

CEDAW Working Group Initiative. *Nota Kesepahaman*. Rena Herdiyani. Surat Elektronik kepada penulis, 1 juli, 2016.

CEDAW Working Group Initiative, *Laporan Bayangan CWGI: Tahun 2012*. Rena Herdiyani. Surat Elektronik kepada penulis, 1 juli, 2016.

Materi Audio-Visual

Kisah Mela dan Miko. Disutradarai Hari Nugroho. 2015. (Kalyanamitra Channel: Youtube). Film Animasi <https://www.youtube.com/watch?v=T0aACqDr1oI>

Wawancara dengan Rena Herdiyani, Koordinator Bidang Program dari Kalyanamitra, oleh penulis. 13 Januari, 2016

Wawancara dengan Rena Herdiyani, Koordinator Bidang Program dari Kalyanamitra, oleh penulis. 25 Februari, 2017

Wawancara dengan Rena Herdiyani, Koordinator Bidang Program dari Kalyanamitra, oleh penulis. 25 Agustus, 2017

Wawancara dengan Rena Herdiyani, Koordinator Bidang Program dari Kalyanamitra, oleh penulis. 5 Oktober, 2017

Situs

PBB. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

Sultana, Abeda. Patriarchy and Women Subordination: a Theoretical Analysis. <https://www.banglajol.info/index.php/AFJ/article/download/12929/9293> (diakses 3 Juni, 2017)

Youth for Human Rights. What are Human Rights. <http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html> (diakses 13 April, 2017)

The Advocates for Human Rights. Human Rights Basic. http://www.theadvocatesforhumanrights.org/human_rights_basics (diakses 13 April, 2017)

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Seri Informasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual: Kekerasan Terhadap Perempuan. http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_VAW_WEB.pdf (diakses 13 April, 2017)

Dan Gleister. 13 Years After He Was Cleared for Murder, OJ Simpson is Jailed for Burglary. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2008/dec/06/simpson-us-sentence> (diakses 13 April, 2017)

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. PBB.
<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm> (diakses 13 April, 2017)

PBB. Short History of CEDAW Convention.
<Http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm> (diakses 13 April, 2017)

Elli N. Hayati. 2013. Domestic Violence Against Women in Rural Indonesia. disertasi Umea University. Swedia

Surya Tjandra, 2016. Labour Law and Development in Indonesia. tesis magister, Universitas Leiden. Belanda,

Edwin. 2009. Perancangan Komunikasi Visual Untuk Mendukung Kampanye “Lawan Pelecehan Seksual Terhadap Wanita” di Jakarta” makalah Sarjana, Universitas Bina Nusantara. Indonesia.

Ruth Indiah Rahayu. 2005. *Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking: Pengukuhan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa* “Makalah disajikan pada Konferensi Warisan Otoritarian di Indonesia, 17-19 November. https://www.academia.edu/1393583/Politik_Gender_Orde_Baru_Tinjauan_Organisasi_Perempuan_Sejak_1980-an

Ramona Biholar. 2014. *Challenging the Barriers to Real Equality: Transformative Equality* “Makalah disajikan dalam Pertemuan Tahunan Kelompok Anggota Parlemen Perempuan Meksiko” 24-25 Juni 2014
<http://www.parlamericas.org/uploads/documents/article-ramona-biholar-en.pdf>

Dwi Wulandari dan Mytha Candria. 2012. *Pemahaman Kader PKK terhadap Panca Dharma Wanita dalam Konteks Critical Discourse Analysis* “makalah disajikan pada Seminar Nasional Budaya di Pantai Utara Jawa, Universitas Diponegoro.

The Observatory of The Universality of Rights. CEDAW Committee: General Recommendation No. 19 on Violence Against Women.
<https://www.oursplatform.org/resource/cedaw-committee-general-recommendation-no-19-violence-women/> (modifikasi terakhir 2017)

UN Women, “Rekomendasi Umum oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,” <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19> (diakses 1 Mei, 2017)

Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk. <http://sp2010.bps.go.id/> (diakses 13 April, 2017)

Palupi Auliani. Survei BPS: Satu dari Tiga Perempuan Indonesia Pernah Jadi Korban Kekerasan. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/05/07100021/survei.bps.satu.dari.tiga.perempuan.indonesia.pernah.jadi.korban.kekerasan> (diakses 3 Juni, 2017)

UNDP. About Human Development. <http://hdr.undp.org/en/humandev> (diakses 3 Juni, 2017)

Beh Lih Yi. Over 90 Percent Rape Case Go Unreported in Indonesia: Poll. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-crime-women/over-90-percent-rape-cases-go-unreported-in-indonesia-poll-idUSKCN1051SC> (diakses 3 April, 2017)

Depositori Koleksi Traktat PBB. Status Traktat. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (diakses 13 April, 2017)

Jurnal Perempuan. 33 Tahun Ratifikasi CEDAW, Pemerintah Diminta Cabut dan Revisi Kebijakan Diskriminatif. <https://www.jurnalperempuan.org/berita/33-tahun-ratifikasi-cedaw-pemerintah-diminta-cabut-dan-revisi-kebijakan-diskriminatif> (midifikasi terakhir 25 Juni, 2017)

Rekomendasi Umum No. 19 (Sesi ke-11, 1992), butir 24 (a), diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Prolegnas 2015-2019. <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> (diakses 6 Juni, 2017)

Catatan Tahunan 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hal. 8, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf, diakses pada 22 Mei 2016

Sekretariat Council of Europe, "The Istanbul Convention and The CEDAW Framework: A Comparison of Measures to Prevent and End Violence," diakses pada 3 Maret, 2016, <https://rm.coe.int/168059aa28>

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 18, diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>

Rekomendasi Umum No. 19 (Sesi ke-11, 1992), butir 1, diakses melalui Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf.

Fatihah Wardah. 7 Maret, 2013. Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Meningkat pada 2012. *Voice of America*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-pada-2012/1616797.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan> (diakses 3 Juni, 2017)

Kompas. 2011, 19 Maret. *Sepantasnya Menyebut Perempuan, Bukan Wanita*, http://www.kompasiana.com/jk.martono/sepantasnya-menyebut-perempuan-bukan-wanita_55009b19a3331153725116a8 (diakses 22 Mei, 2016)

Samantha Hayley. 2016, 27 Oktober. *Domestic Violence Figures in Indonesia are Barely Collected, but Australian Kate Walton is Trying to Change That*. ABC News. <http://www.abc.net.au/news/2016-10-27/australian-expat-collecting-indonesian-domestic-violence-data/7968524> (diakses 3 Juni, 2017)

Siti Rubaidah. 2014, 10 April. *Sepuluh Tahun UU PKDRT*. Jurnal Perempuan <https://www.jurnalperempuan.org/blog/sepuluh-tahun-uu-pkdr>

- Julia Suryakusuma. 2016, 24 November. *Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Deutsche Welle. <http://www.dw.com/id/darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia/a-41422351> (diakses 3 Juni, 2017)
- Sri Lestari. 2017, 7 Maret. *KDRT Tertinggi Dalam Kekerasan Terhadap Perempuan*. BBC Indonesia <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341> (diakses 3 Juni, 2017)
- Ray Jordan. 2016, 8 Jun. *Komnas Perempuan: Ada 8 Bentuk Tindak Kekerasan Seksual yang Bisa Dipidanakan*. Detik, <https://news.detik.com/berita/3228136/komnas-perempuan-ada-8-bentuk-tindak-kekerasan-seksual-yang-bisa-dipidanakan> (diakses 3 Juni, 2017)
- Khaerudin. 2011, 24 Desember. *Perkosaan, Kekerasan Seksual Terbanyak di Indonesia*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/24/21344444/Perkosaan.Kekerasan.Seksual.Terbanyak.di.Indonesia> (diakses 3 Juni, 2017)
- Arisita, Bayu. 2017, 2 Juni. *Kekerasan Seksual, Bentuk Kekerasan Tertinggi di Ranah Publik*. Cendana News. <https://www.cendananews.com/2017/06/kekerasan-seksual-bentuk-kekerasan-tertinggi-di-ranah-publik.html> (diakses 3 Juni, 2017)
- BBC Indonesia. 2016, 16 Mei. *Kasus Kekerasan Seksual Masih Bermunculan* http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160516_indonesia_kekerasan_seksual (diakses 3 Juni, 2017)
- Lutfi. 2016, 10 Juni. *Ini Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual Versi Komnas Perempuan*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/10/11141101/ini.urgensi.uu.penghapusan.kekerasan.seksual.versi.komnas.perempuan> (diakses 3 Juni, 2017)
- Direktorat Jenderal Perundang Undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prolegnas 2010-2014. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html> (diakses 6 Juni, 2017)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Prolegnas 2015-2019. <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> (diakses 6 Juni, 2017)

Ihsanuddin. 2016, 6 Juni. *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/20244371/ruu.penghapusan.kekerasan.seksual.masuk.prolegnas.prioritas.2016> (diakses 4 Juni, 2017)

Iqbal, Muhamad. 2016, 18 Mei. *Baleg DPR Masukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Prolegnas Prioritas*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-3213636/baleg-dpr-masukkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-di-prolegnas-prioritas> (diakses 4 Juni, 2017)

Abba Gabrillin. 2017, 24 Mei. *Kebutuhan UU Penghapusan Kekerasan Seksual Dinilai Semakin Mendesak*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/16471531/kebutuhan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-dinilai-semakin-mendesak> (diakses 4 Juni, 2017)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakan Republik Indonesia. *Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf>

Rini Friastuti. 2015, 5 Oktober. *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Selalu Meningkat Tiap Tahun*. Detik. <https://news.detik.com/berita/3035792/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-selalu-meningkat-tiap-tahun> (diakses 22 Mei, 2016)

Marianna Amirudin. 2013, 30 Maret. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Rumah Bukan Tempat yang Aman!*. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/rumah-bukan-tempat-yang-aman.html>

Lutfy Putra. 2017, 7 Maret. *2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kasus.kekerasan.terhadap.perempuan> (diakses 29 Mei, 2017)

Hera Diani. 2017, 8 Maret. Komnas Perempuan: Kasus KDRT Terhadap Istri Tetap Tertinggi Setiap Tahun. *Magdalene*. <http://magdalene.co/news-1126-komnas-perempuan-kasus-kdrt-terhadap-istri-tetap-tertinggi-setiap-tahun.html> (diakses 29 Mei, 2017)

Kristian Erdianto. 2016, 8 Mei. *Angka Kekerasan Dalam Pacaran Tinggi Tapi UU Belum Melindungi*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasan.dalam.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi> (diakses 25 Mei, 2016)

Humaidy S.. 2010, 14 April. *Menyibak Kekerasan Berkedok Cinta*. Kompas <http://nasional.kompas.com/read/2010/04/14/03023739/menyibak.kekerasan.berkedok.cinta> (diakses 25 Mei, 2016)

Komnas Perempuan. Kekerasan Dalam Pacaran, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekerasan-dalam-pacaran> (21 Oktober, 2017)

Devi Asmarani. 2015, 14 Mei. Kekerasan Dalam Pacaran: Fenomena Sunyi di Indonesia. *Magdalene*. <http://magdalene.co/news-450-kekerasan-dalam-pacaran-fenomena-sunyi-di-indonesia.html> (diakses 25 Mei, 2016)

Kristian Erdianto. 2016, 8 Mei. *Angka Kekerasan Dalam Pacaran Tinggi Tapi UU Belum Melindungi*. Kompas. <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasan.dalam.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi> (diakses 25 Mei, 2016)

Silvita Agmasari. 2016, 6 Mei. *Tiap 2 Jam Ada 3 Wanita Jadi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Kompas. <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/06/110200720/Tiap.2.Jam.Ada.3.Wanita.Jadi.Korban.Kekerasan.Seksual.di.Indonesia> (diakses 30 Mei, 2016)

Sawit Watch. *Press Liris Bersama Tentang Penembakan dan Pembunuhan Petani di Riau Oleh Polisi Membela Perkebunan Kelapa Sawit*. <http://sawitwatch.or.id/2010/11/pers-release-bersama-tentang-penembakan-dan-pembunuhan-petani-riau/>

Melati Fauziyah. 2016, 7 Maret. *Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi*. Media Indonesia (diakses 30 Mei, 2016)

Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM. Data dan Analisa: Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 <http://www.spekham.org/data-dan-analisa-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014/> (diakses 4 Juni, 2016)

Deutsche Welle. 2015, 24 November. "Darurat Kekerasan", Terhadap Perempuan di Indonesia. <http://www.dw.com/id/darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia/a-41422351> (diakses 4 Juni, 2016)

Fathiyah Wardah. 2010, 6 Oktober. *Komnas Perempuan: 189 Perda Diskriminatif*. Voice of America <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-189-perda-diskriminatif/84548.html> (diakses 4 Juni, 2017)

UNDP. A Snapshot of Indonesian Women in Politics. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2014/03/08/a-snapshot-of-indonesian-women-s-politics.html>

Kalyanamitra. Sejarah. <http://www.kalyanamitra.or.id/tentang-kami/sejarah/> (diakses 3 November 2016)

John Macdougall. *Bekasi "Incident"*. Perpustakaan Universitas Ohio <https://www.library.ohio.edu/indopubs/1995/07/30/0005.html> (diakses 5 November 2016)

Febriana Firdaus. 2016, 20 Mei. *Kenangan Pahit di Jembatan Lima*. Rappler, <https://www.rappler.com/indonesia/133617-cerita-pemeriksaan-mei-1998> (diakses 5 November 2016)

Kalyanamitra. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi. <http://www.kalyanamitra.or.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> (diakses 6 November 2016)

Kalyanamitra. Pendampingan Komunitas. <http://www.kalyanamitra.or.id/program/pendampingan-komunitas/> (diakses 10 Februari, 2017)

Thin Lei Win. 2014, 7 April. *Time Running Out for Indonesia's Stalled Gender Equality Bill*. Thomson Reuters Foundation <http://news.trust.org/item/20140407102159-sdf37/> (diakses 26 Agustus, 2017)